

PENDIDIKAN MULTIKULTUR DALAM MEMBANGUN KESADARAN KOLEKTIF TENTANG KEBERAGAMAN

Oleh:

I Nengah Duija

nengahduija@gmail.com

Abstrak

Masyarakat selalu berdinamika seiring dengan perubahan zaman, dalam perspektif kebudayaan pada abad ke-21 tekanan-tekanan yang mempengaruhi objek kebudayaan adalah; ekonomi, teknologi dan etika (Pilliang,1999:334-335). Peran manusia sebagai “pencipta kebudayaan”, hendaknya mampu menyikapi makna perubahan seperti itu, artinya perubahan itu dipahami sebagai sebuah transformasi, maka dalam mencermati krisis budaya yang multisegi, perlu mengambil pandangan yang sangat luas dan memandang situasi dalam konteks evolusi budaya manusia. Haruslah merubah perspektif dari akhir abad kedua puluh ke suatu rentang waktu yang mencakup ribuan tahun; dari pengertian struktur sosial statis hingga persepsi pola-pola perubahan yang dinamis; dengan demikian krisis muncul adalah sebagai suatu aspek transformasi (Capra,1997:11). Dalam masyarakat terjadi reaksi dan kreasi kemajemukan budaya, sehingga persinggungan budaya etnis ini tidak mengarah pada bentuk konflik etnis, tetapi menuju sebuah “peleburan” yang berbentuk adaptasi.

Kata Kunci: Pendidikan Multikultur, Pendidikan Moral

I. Pendahuluan

Secara hakikat setiap masyarakat selalu berdinamika seiring dengan perubahan zaman, perlu disadari bahwa perubahan adalah konsekuensi dari dinamika sebuah kehidupan masyarakat. Masyarakat dan kebudayaan tidak pernah berada dalam keadaan statis, tetapi selalu berada dalam proses yang dinamis. Hal ini disebabkan oleh “dalam masyarakat selalu bekerja dua macam kekuatan” yaitu kekuatan yang ingin menerima perubahan (kaum progresif) dan kekuatan yang cenderung menolak perubahan (kaum konservatif). Dua kekuatan inilah yang merupakan dinamika sosial masyarakat yang selalu tarik-menarik (Kusumohamidjojo,1999:51).

Dalam perspektif kebudayaan pada abad ke-21 tekanan-tekanan yang mempengaruhi objek kebudayaan adalah; ekonomi, teknologi dan etika, hakikatnya adalah *Pertama* perkembangan sistem teknologi tampaknya akan terus berlanjut dan akan mempengaruhi keputusan-keputusan estetik, ia akan berkembang ke arah sistem kompleks. *Kedua* tekanan ekonomi pasar bebas telah mengubah konsep manusia posmodern tentang waktu, diri, individu, keluarga, masyarakat, ruang, bangsa dan negara. *Ketiga* tekanan moral yang menyangkut kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat, termasuk tekanan pada objek kebudayaan (Pilliang,1999:334-335). Di sinilah peran manusia sebagai “pencipta kebudayaan” itu sendiri, hendaknya mampu menyikapi makna perubahan seperti

itu, artinya perubahan itu dipahami sebagai sebuah transformasi, maka dalam mencermati krisis budaya yang multisegi, perlu mengambil pandangan yang sangat luas dan memandang situasi dalam konteks evolusi budaya manusia. Harulah merubah perspektif dari akhir abad kedua puluh ke suatu rentang waktu yang mencakup ribuan tahun; dari pengertian struktur sosial statis hingga persepsi pola-pola perubahan yang dinamis; dengan demikian krisis muncul adalah sebagai suatu aspek transformasi (Capra,1997:11).

Jika perubahan itu tidak dipahami sebagai suatu aspek transformasi, mungkin manusia sering akan mengalami “keterkejutan budaya”. Oleh karena perubahan dianggap sebagai beban hidup manusia masa kini, sehingga tidak berusaha untuk merespon perubahan budaya itu sebagai suatu tantangan yang harus dijawab. Perubahan budaya manusia sesungguhnya merupakan tantangan hidup manusia, artinya sejauh mana manusia mampu menjawab tantangan tersebut, sehingga akan bermuara pada identitas budaya baru yang dibentuk oleh pergulatan nilai lama (tradisional) dengan nilai baru (modern) itu. Arnold Toynbee melihat pola dasar dalam terjadinya kebudayaan itu sebagai suatu pola interaksi yang disebutnya dengan *Dialektif Challenges and Response* atau “tantangan dan tanggapan”(Bakker,1984:76). Tantangan dari lingkungan alam dan sosial memancing tanggapan kreatif dalam suatu masyarakat, atau kelompok sosial, yang mendorong masyarakat itu memasuki proses kebudayaan (Capra,1997: 13).

Jika disimak alur pemikiran dari Arnold Toynbee di atas, maka tantangan dan tanggapan ini sebagai bentuk kekuatan yang saling tarik-menarik dalam dinamika masyarakat dan kebudayaan, yang akan menentukan lahirnya identitas kultural baru, sesuai dengan daya kreativitas masyarakat sebagai pencipta dan pendukung kebudayaan itu sendiri. Kreativitas ini adalah bentuk pergulatan nilai budaya yang memerlukan waktu panjang untuk mencari jati diri atau identitas apakah yang lahir identitas baru atau masih mempertahankan yang asli, bahkan campuran. Identitas inilah yang menjadi persoalan di tengah-tengah proses perubahan budaya di setiap masyarakat di bumi ini. Perubahan budaya adalah perubahan-perubahan yang terjadi atas kebudayaan, sebagai akibat dari berbagai kejadian atau proses suatu bangsa (Sedyawati,1997:3). Berbagai eksekusi mungkin terjadi selama proses pergulatan (perubahan budaya) berlangsung, baik yang mengarah pada harmonisasi atau keseimbangan (*equilibrium*), maupun yang mengarah pada konflik-konflik internal maupun eksternal.

Kedua eksekusi tersebut, sebagai konsekuensi dari persinggungan berbagai unsur kebudayaan yang berakumulasi pada suatu masyarakat yang telah memiliki kebudayaan yang mengakar. Terlebih lagi dalam konteks masyarakat yang multietnis, multiagama, multilinguis dan sebagainya. Dalam masyarakat multietnis ada kecenderungan dominasi satu kebudayaan di atas kebudayaan yang lainnya, dalam konteks pemahaman budaya mayoritas dan minoritas. Pada masyarakat multietnis seperti itu titik-titik persinggungan budaya antaretnis memiliki peluang besar untuk menjadi konflik etnis, Oleh karena sebagian besar konflik antaretnis yang terjadi bermula dari munculnya rasa ketidakpuasan yang dialami oleh kelompok masyarakat etnis minoritas atas perlakuan kelompok mayoritas dalam negara yang terdiri dari kelompok masyarakat yang majemuk (Perwita, 1996:150). Konflik etnis ini terjadi apabila tidak ada perasaan saling menghormati

keberadaan budaya etnis masing-masing. Fenomena yang umum yang terjadi pada masyarakat multietnik adalah budaya “pendatang” sering beradaptasi dengan kebudayaan lokal, dan hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk penghormatan kepada budaya etnis tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi masalah sakarang adalah bagaimana reaksi dan kreasi masyarakat dalam kemajemukan budaya, sehingga persinggungan budaya etnis ini tidak mengarah pada bentuk konflik etnis, tetapi menuju sebuah “peleburan” yang berbentuk adaptasi. Inilah yang menjadi topik pembincangan pada kesempatan ini, lebih-lebih di Indonesia pasca Orde Baru menuju era reformasi. Fenomena ini sangat menarik mengingat bangsa Indonesia saat ini tengah “konsolidasi” internal untuk mewujudkan Indonesia Baru. Pada proses konsolidasi inilah diperlukan sebuah pemahaman yang mendalam tentang makna keindonesiaan dalam konsep kemajemukan baik secara horizontal maupun vertikal dengan tujuan mengeliminir berbagai “benturan” kepentingan yang menyangkut politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya.

Untuk mengantisipasi berbagai benturan dalam masyarakat multietnik atau multibudaya, salah satu upaya yang perlu dilakukan melalui jalur pendidikan. Jika dicermati gugurnya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), sesungguhnya telah memberikan suatu jalan menuju pendidikan demokratis (baca: multikultur). Selanjutnya akan diberikan uraian bagaimana konsep pendidikan multikultur itu, apakah memungkinkan dikembangkan pendidikan multikultur itu di Indonesia, khususnya di Bali.

II. Pembahasan

2.1 Konsep Dasar ”Multikultur atau Multietnis, atau Multibudaya”

Struktur masyarakat Indonesia secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan social berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat-istiadat dan perbedaan kedaerahan. Sedangkan secara vertical ditandai dengan adanya pelapisan social yakni lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 1995 : 28). Oleh karena itu masyarakat Indonesia tidak hanya sekedar bersifat majemuk dan jamak, tetapi juga sungguh rumit serumit jalinan suatu labirin. Dalam hubungan dengan masyarakat yang sedemikian kompleks, sering ada godaan untuk memperkuat posisi negara (sebagaimana yang biasanya diwakili oleh pemerintah) untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan sentripetal dan menjaga kohesi masyarakat (Kusumohamidjojo, 2000 : 149). Pluralitas itu tidak hanya berkaitan dengan budaya (*multicultural*)⁵, tetapi juga dimensi social, politik dan ekonomi masyarakat. Meskipun bangsa Indonesia telah merdeka selama 53 tahun, pluralitas masyarakat itu kurang dimanfaatkan sebagai potensi yang dapat didinamiskan untuk memacu pembangunan, namun justru kebijakan politik pembangunan selama ini adalah keanekaragaman diarahkan pada bentuk uniformitas (Sairin, 1999 : 93).

5

Masyarakat tidak dapat dibayangkan tanpa kebudayaan, dan sebaliknya, kebudayaan hanya relevan karena masyarakat yang menciptakannya. Karena masyarakat selalu merupakan subjek dalam hubungan dengan kebudayaannya, kebudayaan dengan demikian dapat dipandang sebagai keseluruhan karya masyarakat, sekalipun pada saat yang bersamaan bisa disangkal bahwa kebudayaan juga membentuk kepribadian warga dari suatu masyarakat (Kusumohamidjojo,1999:31). Oleh karena itu berbicara masalah masyarakat majemuk dapat dimaknai sebagai jalan memahami kemajemukan kebudayaan masyarakat Indonesia, yang memang dari segi geografis telah membentuk lapis-lapis budaya secara horizontal. Faktor geografis ini merupakan salah satu pembentuk struktur masyarakat Indonesia sebagai sebuah sistem kemasyarakatan dan kebudayaan nasional. Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, kedaerahan. Secara vertikal struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perbedaan suku bangsa, agama, adat dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, suatu istilah yang mula-mula diperkenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda (Nasikun,1995:28).

Young dalam bukunya *The Politics of Cultural Pluralism* (1979) sebagaimana dikutip Usman Pelly dan Asih Menanti (1994:94), memberikan definisi operasional mengenai masyarakat atau kebudayaan majemuk yang terdiri dari tiga komponen dasar yaitu:

1. Kemajemukan berkaitan dengan suatu kekuasaan atau pemerintahan yang menguasai suatu teritorial tertentu yang mengatur atau memberikan batas-batas wilayah yang jelas terhadap masing-masing kelompok masyarakatnya, di mana mereka dapat melakukan interaksi satu sama lainnya.
2. Dua atau lebih kumpulan (agregasi) masyarakat yang secara kultural dapat dibedakan baik dari sistem budaya maupun politik yang masing-masing mereka miliki. Perbedaan ini dapat diidentifikasi oleh orang lain atau aktor (anggota masyarakat itu sendiri). Perbedaan tersebut merupakan faktor yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan terutama dalam kompetisi, interaksi dan konflik yang terjadi dalam berbagai bentuk transaksi dalam pemerintahan.
3. Dasar solidaritas pengelompokan adalah kebersamaan komunal, atau perkawinan/persaudaraan antaretnis, bahasa kesatuan, kesamaan ras, kasta, kesatuan hubungan darah yang diasumsikan, adat kebiasaan (*costum*) dan wilayah (teritorial) kenegaraan (*state*).

Pemahaman tentang kemajemukan masyarakat dan kebudayaan seperti di atas, ternyata diberikan catatan penting berkaitan dengan pluralisme kebudayaan oleh Young sendiri yaitu, bahwa Pengelompokan tersebut tidak perlu dianggap permanen dan kaku, sebab dia akan berubah dan melentur atau melebur dalam jangka waktu yang panjang dalam kaitannya dengan perubahan sosial dan politik, setiap anggota kelompok tidak perlu dianggap sejak kelahirannya akan tetap

berada dalam satu kelompok tertentu. Dia dapat berada sekaligus dalam beberapa kelompok (afiliasi budaya), dia juga dapat pindah dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya, setiap kelompok budaya memiliki tingkat, bentuk identitas, dan ideologi yang berbeda berkaitan dengan bobot; seperti dari bobot ideologi yang ketat dan kaku sampai bentuk dan kadar yang longgar atau bersahaja (Ibid,1994:94). Jadi suatu masyarakat bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat beranekaragam (Nasikun,1995:32-33).

Catatan Young sangat penting untuk melihat fenomena kemajemukan masyarakat dan kebudayaan Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis yang secara teritorial telah membentuk identitas kebudayaannya sendiri-sendiri. Kemajemukan masyarakat Indonesia telah mengindikasikan adanya kemajemukan budaya, baik pada tataran lokal maupun nasional bahkan global. Dalam masyarakat majemuk sangat sulit mengingkari munculnya kemajemukan budaya, oleh karena masing-masing subkelompok memiliki identitas budaya yang sulit untuk ditunggalakan, meskipun dalam konteks kebudayaan nasional sebagai ciri identitas kebangsaan.

Berdasarkan konsep masyarakat dan kemajemukan budaya seperti di atas, maka ada tiga tipe negara yang berkaitan dengan keanekaragaman budaya yang dikelolanya dalam perspektif sejarah yaitu:

1. Tipe pertama adalah yang bermula dari upaya pembangunan imperium. Imperium ini terdiri atas sejumlah negara, umumnya kerajaan-kerajaan, yang pada awalnya merupakan negara bebas. Negara-negara tersebut berada di bawah kekuasaan Dan pemantauan dari kaisar dan pemerinitahanya, mereka bisa memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan Kaisar, meskipun kebudayaan lokal itu sebenarnya ada, tetapi tidak diberi pengakuan yang nyata, oleh karena demi penghormatan kepada kebudayaan Kaisar.
2. Tipe kedua adalah keanekaragaman budaya dapat berkembang secara rumit, kadang-kadang pertikaian tidak dapat dihindarkan antara sesama pendatang dan penduduk asli, bahkan di antara sesama pendatang.
3. Tipe yang ketiga adalah negara dimana keanekaragaman budaya itu berlandaskan prinsip penyatuan dan kesatuan. Dalam tipe ini sejumlah kelompok etnik bergabung dan menyatukan diri untuk membentuk satu negara, dan sejalan dengan itu membentuk bangsa baru, bangsa kesatuan, yang dilandasi oleh cita-cita bersama untuk masa depan, kesamaan latar belakang sejarah, serta kedekatan budaya (Sedyawati,1997:8-9).

Dari ketiga tipe di atas, maka tipe ketiga itu sangat gayut dengan konsep keanekaragaman budaya di Indonesia (baca :multikulturalisme). Oleh karena di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik baik yang besar maupun kecil (Geertz, 1967:24; Sedyawati,1997:9), Sebagai perimbangan dapat dilihat dalam konteks keanekaan budaya dari aspek bahasa daerah yang berkembang di Indonesia, bahwa Indonesia adalah negara nomor dua terbesar setelah Papua Niugini (850) yang memiliki keanekaragaman bahasa daerah yaitu berjumlah 670 (Durning,1995:220; Bagus,2001:15). Jika dilihat korelasi antara keanekaragaman budaya dan bahasa sebagai salah satu unsur kebudayaan, maka tampak jelaslah

bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki kemajemukan budaya atau multi budaya, yang dalam pandangan posmodernisme dikenal dengan istilah multikulturalisme.⁶ Paham multibudaya atau multikulturalisme diperkirakan dibentuk pertama kali pada tahun 1960 oleh ahli sosiologi Kanada, Charles Hobart ketika dilangsungkannya Konferensi tentang Dewan Kanada tentang agama Kristen dan Yesus di Winnipeg (Manitoba) Kanada, namun sebagai wacana politik yang resmi berkembang di Kanada tahun 1997 dan di Australia tahun 1977-1978 (Ardhana,2001:3), konsep multikulturalisme ini diterjemahkan Edi Sedyawati sebagai konsep “aneka budaya” (Bagus, 2001:8).

Kembali pada konsep dasar dasar multikulturalisme, menurut Ritzer (2008 :325) dalam cara yang lebih positif, kaum multikulturalisme senada dengan gagasan desentralisasi. Jelasnya, dalam dunia sosial, dan analisis-analisis mengenai dunia tersebut, seluruh terpusat pada kelompok-kelompok utama. Kaum multikulturalisme ingin melihat keduanya didesentralisasikan. Kelompok-kelompok minoritas seharusnya, dalam pandangan mereka menempati posisi yang lebih penting dalam dunia sosial, dan mereka harus diberikan signifikansi yang sama dalam analisis-analisis dunia tersebut. Di sisi lain, Alfons Taryadi sebagaimana dikutip Nugroho (2009 :15-16) menyebutkan ada lima jenis multikulturalisme, yaitu.

1. Multikulturalisme isolasionis : mengacu pada visi masyarakat sebagai tempat kelompok-kelompok budaya yang berbeda menjalani hidup mandiri dan terlibat dalam saling interaksi minimal sebagai syarat yang niscaya untuk hidup bersama ;
2. Multikulturalisme akomodatif : mengacu pada visi masyarakat yang bertumpu pada satu budaya dominan, dengan penyesuaian-penyesuaian dan pengaturan yang pas untuk kebutuhan budaya minoritas ;
3. Multikulturalisme mandiri : mengacu pada visi masyarakat di mana kelompok-kelompok budaya besar mencari kesetaraan dengan budaya

⁶ Menurut Lawrence Blum “multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis lain. Multikulturalisme meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. Baca: Nugroho,2009. “Multikulturalisme” Dalam Buku *Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama Dalam Perbedaan*. Editor Bambang Sarwiji. Halaman 13. Bandingkan dengan Bhikhu Parekh,2008. Bahwa istilah ‘masyarakat multicultural dan ‘multikulturalisme’ pada umumnya dipergunakan untuk merujuk pada satu masyarakat yang menunjukkan ketiga keanekaragaman seluruhnya serta keanekaragaman lainnya.*Rethinking Multiculturalism Keragaman Budaya dan Teori Politik*. Impulse. Yogyakarta. Hal 17. Presiden Soekarno dalam amanatnya pada pembukaan Kongres Nasional ke-8 Baperki di Senayan, 14 Maret 1963 mengatakan: “Di Indonesia kita tidak mengenal minority [...] Di Indonesia itu paling-paling ada suku-suku. [...] Suku itu artinya *sikil*, kaki. Djadi bangsa Indonesia itu banyak kakinya, seperti luwing. Saudara-saudara. Ada kaki Djawa, kaki Sunda, kaki Sumatra, kaki Dajak, kaki Bali, kaki Sumba, kaki Peranakan Tionghoa [...] Kaki daripada satu tubuh, tubuh bangsa Indonesia” (dalam Simbolon,1999:22)

dominan dan bertujuan hidup mandiri dalam satu kerangka kolektif yang dapat di terima ;

4. Multikulturalisme kritis atau interaktif : merujuk pada visi masyarakat sebagai tempat kelompok-kelompok kultural yang kurang peduli untuk menempuh idup mandiri dan lebih baik dalam menciptakan satu budaya kolektif yang mencerminkan dan mengakui perspektif mereka yang berbeda-beda ;
5. Multikulturalisme kosmopolitan : mengacu pada visi masyarakat yang berusaha menerobos ikatan-ikatan kultural dan membuka peluang bagi para individu yang kini tidak terikat pada budaya khusus, secara bebas bergiat dalam eksperimen-eksperimen antarkultur dan mengembangkan satu budaya milik mereka sendiri.

2.2 Konsep Pendidikan dan Mendidik

Pendidikan atau mendidik disebut perbuatan fundamental atau yang mengubah, menentukan hidup manusia, karena mendidik itu *me-manusia-kan* manusia (muda), karena mendidik itu hominisasi dan humanisasi, perbuatan yang menyebabkan manusia menjadi manusia (Driyarkara,1991:87). Sedangkan mengajar adalah penyerahan kebudayaan berupa pengalaman-pengalaman, kecakapan kepada anak didik atau usaha mewariskan kebudayaan masyarakat pada generasi yang berikutnya sebagai generasi penerus (Roestiyah,1989:12).

Menurut Hafi Anshari (1983:71-73) pendidik yaitu orang yang melaksanakan pendidikan (subjek pendidikan). Dialah sebagai pihak-pihak yang mendidik. Pihak yang memberikan anjuran, norma-norma, bermacam-macam pengetahuan dan kecakapan. Pihak yang turut membentuk anak, pihak yang turut menghumanisasikan anak. Oleh karena sedemikian besar tugas mendidik, maka mendidik anak adalah sebagai tugas suci⁷ yang luhur dan meminta tanggung jawab yang besar. Ada dua macam pendidik (1) pendidik secara kodrat, yaitu yang secara otomatis seperti orang tua dalam lingkungan keluarga dengan kesadaran yang mendalam selalu mengasuh anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab serta kesabaran. (2) pendidik sebagai jabatan, yaitu orang-orang tertentu yang mempunyai tanggung jawab mendidik karena fungsi jabatannya, misalnya para guru dalam lembaga, sekolah, para pemimpin dalam masyarakat dan sebagainya.

Pendidikan agama Hindu sebagai subsistem pendidikan nasional sebagaimana dijelaskan di atas adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam memahami, meyakini, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Hindu sebagai wujud pengamalan Pancasila di lingkungan umat Hindu melalui bimbingan pengajaran dan latihan dengan memperhatikan tuntutan saling hormat-menghormati antar umat beragama untuk mewujudkan persatuan nasional (Awanita dkk,2001:16). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

⁷ Pemberian yang berupa ilmu pengetahuan (mendidik) jauh lebih utama dibandingkan dengan pemberian yang berupa materi. Baca: Bhagawagitha, IV.33. oleh I Nyoman S. Pendit,1994. hal.135. Ini berarti hakikat ilmu pengetahuan sangat luhur yang berimplikasi pada pendidik dan yang didik sama-sama memperoleh pahala atau manfaat dari ilmu pengetahuan itu sendiri.

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 : UU Sisdiknas No.20/2003). Pendidikan ada sepanjang peradaban dan kebudayaan manusia karena hanya manusia yang merupakan makhluk budaya, yang bisa memperbaiki hidupnya dengan belajar dari tidak tau menjadi tidak tahu.berbeda halnya dengan binatang yang berbuat hanya berdasarkan kebiasaan (*dreasure*) dan insting belaka. Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai pembimbing bagi segala tingkah laku perbuatan manusia dalam hidupnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bersama di masyarakat (Freman Butts dalam Idris,1992:12). Kebudayaan merupakan bentuk perjuangan manusia menghadapi tantangan alam dan zaman yang terus berkembang, serta kodrat dasar manusia.dari sinilah munculah pendidikan dan pengajaran yang merupakan wadah yang menampung benih-benih kebudayaan.

Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedagogie* kata ini terdiri atas kata *pais* yang artinya anak, *agogos* berarti bimbingan, tuntunan dan *iek* artinya ilmu. "*Paedagogie* berarti ilmu tentang cara membimbing atau menuntun anak"(Suwarno,1992:1). Pendidikan adalah fenomena fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia di mana ada kehidupan manusia, bagaimana pun juga di situ pasti ada pendidikan (Driyarkara,1991:32)

Pendidikan merupakan segala sesuatu yang tepat serta mengambil bagian dalam pemberian bantuan dalam perkembangan anak dalam arti (Simanjuntak,1993:6). Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan merupakan usaha untuk menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak agar anak sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan selama-lamanya dan setinggi-tingginya, (Idris, 1992). Pendidikan merupakan hak setiap orang dan berlangsung seumur hidup dan berlangsung diberbagai tempat. Menurut Hadari Nawawi, (1991:8). Pendidikan itu pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi pendidikan tidak memandang tempat,dapat berlangsung secara formal,non formal dan informal yang lebih dikenal dengan *Tri Sentral Pendidikan* (Tiga pusat pendidikan) antara lain : (1) Keluarga; keluarga unit terkecil dalam masyarakat terbentuknya berdasarkan suka rela dan cinta yang asasi antara dua subjek (suami-istri). Motivasi pengabdian keluarga (orang tua) ini semata-mata demi cinta kasih yang kodrati. Di dalam suasana cinta dan kemesraan inilah proses pendidikan berlangsung seumur hidup, yang dimulai anak itu dalam tanggung jawab keluarga. (Muri ,1982 : 61-62). (2) Sekolah; sekolah bertugas untuk merumuskan pembinaan yang telah diletakkan dasar-dasarnya dalam lingkungan keluarga. Sekolah menerima tanggung jawab pendidikan berdasarkan kepercayaan keluarga dan (3) Masyarakat (Muri,1982 : 12)

Konsep pendidikan dalam perspektif Hindu⁸ sangat dipentingkan, bahkan secara normatif telah diatur sedemikian rupa mulai dari masa kanak-kanak hingga

⁸ Konsep mendidik dalam konteks budaya Bali telah dijelaskan di atas, yaitu sering menggunakan media menyanyi, bermain (*malajah sambilang magending* atau *matembang*). Kegiatan

menjelang ajal tiba yang bukan saja berguna di alam maya ini tetapi juga kelak setelah meninggal (*widya çâstra sudharma dipanikanang tri-bhuwana semênö prabhâswara*). Di bagian lain Niti Sastra.V .1 menyebutkan:

*Taki-takining sewka guna widya
Smara-wisaya rwang puluhing ayusa,
Têngah i tuwuh san-wacana gêgön-ta
Patilaring âtmeng tanu pagurokên.*

Terjemahannya:

Semasih muda bersiap-siaplah untuk menuntut ilmu
Berumah tangga setelah berumur dua puluh tahun,
Setengah umur kebenaran kata-kata hendaknya dipegang,
Hanya untuk menunggalnya jiwa patut diusahakan.

Kesaksian di atas, tentu dengan pemahaman bahwa tingkat-tingkat pencapaian spiritual diawali oleh pendidikan⁹ sebelum menapak kehidupan selanjutnya sebagai *grehasta*, *wanaprasta* dan akhirnya *sanyasin*. Untuk mencapai kebebasan di ketiga alam, maka pengetahuan (pendidikan) inilah menjadi dasarnya. Kejelasan ucapan, kemurnian tubuh, kesucian jiwa, semua dari ketiga hal ini adalah tujuan yang dituju oleh pendidikan (Radhakrishnan,2000:23). Menurut Ki Hajar Dewantara sebagaimana dikutip oleh I Gusti Ngurah Bagus (1968:14) menyebutkan bahwa pendidikan adalah salah satu usaha untuk memberikan segala nilai-nilai kebatinan yang ada pada hidup rakyat yang berkebudayaan (*cultuur over dracht*), tidak hanya berupa pemeliharaan akan tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju arah keluhuran dan kehalusan hidup kemanusiaan.

2.3 Pendidikan Multikultur "Pendidikan Demokratis-Humanis" ?

Pada dasarnya, pendidikan multikultur merupakan sebuah kritik bagi sistem pendidikan yang Eropasentris dengan muatan monokultur dari sistem pendidikan yang berlaku. Eropasentrisme menyatakan dua tesis, yaitu : *Pertama* peradaban Eropa modern, yang terjadi pasca abad ke-17 di mana peradaban Eropa merepresentasikan kehidupan tertinggi yang sejauh ini dicapai umat manusia dan memberikan tolok ukur baku untuk menilai sesamanya. *Kedua* peradaban tersebut mendapat kejayaannya tanpa bantuan, dan berhutang sedikit

pembelajaran seperti ini dapat berlangsung dalam berbagai konteks situasi. Dengan demikian mendidik di sini dimaksudkan bukan tersktruktur seperti di kelas atau di sekolah formal.

⁹ Masa mendidik dan pendidikan dalam konteks agama Hindu disebut masa *Brahacari* atau masa *aguron-guron* (baca: *Silakrama*). Pada masa ini diutamakan sebagai masa menuntut ilmu pengetahuan yang sering disebut *guna widya*. Pada masa ini (anak-anak) adalah kondisi yang sangat ideal untuk belajar (mendidik dan pendidikan), karena di dalam masa kanak-kanak hingga dewasa ini diibaratkan seperti daun alang-alang yang baru tumbuh. Konotasinya adalah saat pencerapan ilmu pengetahuan yang cepat dan tajam, lain halnya alang-alang yang sudah tua batangnya akan layu dan kering. *Guna widya* menjadi penting dalam perjalanan hidup seseorang baik di dunia ini maupun dunia akhirat nanti.

kepada peradaban-peradaban non-Eropa (Parekh,2008 :299). Dalam beberapa hal perlu dipahami tingkat-tingkat konsep pendidikan multikultural menyangkut persoalan-persoalan mendasar sebagai berikut:

Pertama, perlu adanya suatu konsep yang jelas mengenai kebudayaan. Misalnya; apakah yang dimaksudkan dengan kebudayaan nasional. Apakah kebudayaan nasional Indonesia itu sudah ada atau kebudayaan nasional merupakan campuran dari berbagai budaya suku yang ada dalam masyarakat Indonesia ? Masalah ini telah muncul sejak polemik kebudayaan tahun 1935 dan mungkin permasalahannya akan terus-menerus menjadi wacana yang tidak pernah akan selesai.

Kedua, apakah peranan pendidikan dalam membentuk identitas budaya dan identitas bangsa Indonesia ? Hal ini juga merupakan suatu wacana yang terus-menerus akan muncul dalam proses pendidikan dan proses kehidupan bangsa Indonesia yang berbudaya.

Ketiga, bagaimanakah hakikat pluralisme yang berarti pengakuan terhadap kelompok-kelompok minoritas di masyarakat ? Hal ini memang merupakan hal yang ruwet yang tidak jarang dapat menimbulkan kontradiksi dalam hidup masyarakat. Ketegangan-ketegangan horizontal yang terjadi akhir-akhir ini dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu pergolakan dalam mencari jawaban terhadap hakikat pluralisme.

Keempat, Bagaimanakah hak orang tua dalam menentukan pendidikan bagi anaknya (pertanyaan ini juga akan muncul dalam masyarakat yang pluralis yang tidak jarang dapat menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat). *Public education* di Amerika Serikat dalam dua dekade terakhir memunculkan ketegangan-ketegangan akibat menonjolkan hak-hak minoritas dan hak-hak azasi manusia.

Kelima, tidak kurang pentingnya pula dipermasalahkan nilai-nilai manakah yang akan dipertimbangkan (*shared values*) dalam masyarakat majemuk atau pluralistic society. Hal ini berkaitan dengan masalah pertama mengenai konsep budaya nasional.

Berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas menunjukkan betapa rumit dan banyaknya masalah yang ditimbulkan dalam pendidikan multikultur. Beberapa di antaranya adalah: (1) Pendidikan multikultur merupakan suatu proses. Artinya, konsep pendidikan multikultur yang baru dimulai dalam dunia pendidikan di Indonesia memerlukan proses perumusan, refleksi dan tindakan di lapangan sesuai dengan perkembangan konsep-konsep yang fundamental mengenai pendidikan dan hak-hak azasi manusia. (2) Pendidikan multikultur merupakan suatu yang *multifaset*, oleh sebab itu meminta suatu pendekatan lintas disiplin (*border crossing*), maupun dari pakar dan praktisi pendidikan untuk semakin lama semakin memperhalus dan mempertajam konsep pendidikan multikultur yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Pendidikan multikultural dengan demikian sering dimaknai sebagai suatu studi tentang keanekaragaman kultural, hak-hak azasi manusia serta pengurangan

atau penghapusan berbagai jenis prasangka atau *prejudice* demi untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang adil dan tenteram. Artinya, pendidikan multikultural mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap *bangsanya* (*the pride in ones home nation*). Secara operasional, pendidikan multikultural pada dasarnya adalah program pendidikan yang menyediakan sumber belajar yang jamak bagi pebelajar (*multiple learning environments*) dan yang sesuai dengan kebutuhan akademik maupun sosial peserta didik.

Tujuan program pendidikan multikultural adalah untuk membantu peserta didik, yaitu (1) memahami latar belakang diri dan kelompok dalam masyarakat, (2) menghormati dan mengapresiasi kebhinekaan budaya dan sosio-historis etnik, (3) menyelesaikan sikap-sikap yang terlalu etnosentris dan penuh purbasangka, (4) memahami faktor-faktor sosial, ekonomis, psikologis, dan historis yang menyebabkan terjadinya polarisasi etnik, ketimpangan, dan keterasingan etnik, (5) meningkatkan kemampuan menganalisis secara kritis masalah-masalah rutin dan isu melalui proses demokratis melalui sebuah inkuiri dialogis, (6) mengkonseptualisasi dan mengaspirasikan sebuah visi tentang masyarakat yang lebih baik, adil dan bebas, dan (7) mengembangkan jatidiri yang bermakna bagi semua orang (Tantra, tt:5).

III. Simpulan

Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam melahirkan tenaga-tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang memiliki pemahaman dan wawasan tentang multikultural. Dengan pemahaman dan wawasan yang luas terhadap tujuan dari pendidikan multikultural, dapat dibentuk watak (*character building*) para mahasiswa dan lulusan yang baik sehingga konflik rasial, agama, dan suku dapat dihindarkan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, PT sepatutnya menyertakan dalam kurikulumnya dimensi-dimensi pendidikan multikultural sebagai jawaban terhadap tuntutan kebhinekaan budaya yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, sikap yang seharusnya mendasari masyarakat multikultural adalah sikap rendah hati, bahwa tidak ada seorangpun yang mampu memiliki kebenaran absolut dan manusia bukan makhluk yang sempurna, sehingga memerlukan orang lain dalam proses “menjadi-kan” dirinya, khususnya melalui dunia pendidikan.

Daftar Pustaka

- Anshari, Hafi, 1983. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional
- Ardhana, I Ketut, 2001. *Masyarakat Multibudaya, Sejarah dan Kerangka Teoritis*. Makalah disampaikan pada Matrikulasi Mahasiswa Magister (S2) Kajian Budaya. Denpasar: Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya Unud.
- Awanta, I Made dkk, 2001. *Bahan Dasar Pendidikan Wawasan Kependidikan Guru Pendidikan Agama Hindu di Sekolah Lanjutan Pertama*. Jakarta: Depdiknas.

- Bagus, I Gusti Ngurah, 1995 (Penyunting). *Beberapa Permasalahan Sosial Dalam perspektif Hindu Dharma. Pidato Swami Vivekananda pada Sidang Parlemen Agama-agama di Chicago*. Denpasar: Upada Sastra
- Bakker, J.W.M,1984. *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kanisius.
- Capra, Fritjof, 1997. *Titik Balik Peradaban Sains, Masyarakat Dan Kebangkitan Kebudayaan*. Penerjemah M. Thoyibi. Yogyakarta : Benteng Budaya.
- Driyarkara,1991. *Tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Durning, Alan Thein,1995. “Mendukung Penduduk Asli” Dalam Lester R. Brown dkk, *Masa Depan Bumi*. Penerjemah Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Geertz, H, 1967. “Indonesian Culture and Communities” dalam Ruth.T. Mc Vey,(ed) *Indonesian, Southeast AsiaStudies*, Yale University Press.
- Hasan, Puad, 1993. *Renungan Budaya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwiyanto, Agus, 1999. *Membangun Masyarakat Madani : Tinjauan Birokratik-Politik” Dalam Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Milenium ke –3*. Program Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Malang (ed). Yogyakarta : Aditya Media.
- Gellner, Ernest, 1995. *Membangun Masyarakat Sipil*. Bandung : Mizan.
- Hikam, Muhammad AS, 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta : LPBES.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2000. *Kebhinekaan Masyarakat di Indonesia, Suatu Problematic Filsafat Kebudayaan*. Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Nasikun, 1995. *Sistem Social Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, H. & Hadari, M. 1991. *Administrasi Personil ; Untuk Peningkatan Produktifitas Kerja*. Jakarta : Yayasan Mas Agung
- Nugroho, St.2009. ”Multikulturalisme”. Dalam *Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama Dalam Perbedaan*. Editor Bambang Sarwiji. Jakarta: Ideks.
- Parekh, Bhikhu.2009. *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Impulse.
- Perwita, A.A Banyu,1996. “Konflik Antaretnis dalam Masyarakat Global Dan Relevansinya Bagi Indonesia” dalam *Analisis CSIS* tahun XXV No.2 Maret-April. Jakarta: CSIS.
- Pelly, Usman dan Asih Menanti, 1994. *Teori-Teori Sosial Budaya*. Jakarta: Preyed Pembinaan Dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti, Depdikbud.
- Pilliang, Yasraf Amir,1999. *Sebuah Dunia yang Dilipat Realitas Kebudayaan Menjelang Millenium Ketiga Dan Matinya Posmodernisme*. Bandung: Mizan
- Sedyawati, Edi, 1997. “Kebudayaan dan Pembangunan” dalam *Masalah Budaya Dan Pariwisata dalam Pembangunan*. I Gusti Ngurah Bagus (Penyunting). Denpasar: Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya Unud.
- Simbolon, T Parakirti, “ Dalam Pangkuan Bhinneka Tunggal Ika” dalam *Pesona Bahasa Nusantara Menjelang Abad Ke-21*. Jakarta: PMB LIPI KPG dan The Ford Foundation.
- Radhakrishnan, S, 2000. *Pencarian kebenaran*. Penerjemah tri budhi sastro. Yogyakarta : Forum Penyadaran Dharma bekerjasama dengan duta wacana University press.

- Ritzer, George.2008. *Teori-Teori Posmodernisme*. Penerjemah: Mohammad Taufik. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Roestiyah, Ny N.K,1989. *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sairin, sjafri, 1999. “Masyarakat Madani Dan Tantangan Budaya” dalam membangun masyarakat madani menuju Indonesia baru milenium ke-3 : program pascasarjana Univ. Muhamadiyah Malang (ed). Yogyakarta : Aditya Media.
- Sudarsana, I. K. (2018). Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Terhadap Peningkatan Mutu Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 4(1), 20-31.
- Toffler, Alvin,1990. *The Third Wave. Gelombang Ketiga*. Jakarta: Pantja Simpati
- Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Surabaya: Karina